

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh penerapan kebijakan *e-government* dan penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Penerapan *e-government* pada Dinas Pendidikan D.K.I. Jakarta sudah berjalan baik. Hal ini sesuai jawaban responden terhadap variabel penerapan kebijakan *e-government*, berdasarkan teori 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan birokrasi (*beureucratic structure*). Hal ini terlihat dari jumlah persentase sebesar 74%-86% yang termasuk dalam kategori baik. Selain itu, disimpulkan juga bahwa penerapan kebijakan *e-government* pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta dilakukan dengan proses yang baik, yakni dimulai dari adanya sosialisasi, kesiapan sumber daya, komitmen, dan aturan yang jelas, serta adanya dukungan yang tinggi dari pimpinan.
2. Berdasarkan rata-rata skor variabel Y sebesar 86% dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta berada

pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta sudah berada pada kategori baik dan memuaskan.

3. Tingkat kompetensi pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta diperoleh persentase sebesar 77% yang termasuk pada kategori tinggi sehingga angka tersebut dapat diartikan bahwa pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta memiliki kompetensi yang cukup tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Implementasi kebijakan *e-government* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta. Implementasi kebijakan *e-government* memberikan pengaruh sebesar 48,7% terhadap perubahan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta. Meskipun tidak terlalu besar, namun implementasi kebijakan *e-government* merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan kebijakan *e-government* dan penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sehingga implikasi yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *e-government* pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta terbukti menjadi salah satu faktor penting terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan *e-government* terdapat mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain melalui penggunaan teknologi informasi sehingga kualitas pelayanan terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kerja.
2. Kompetensi penyusun anggaran juga terbukti menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta. Dalam penelitian ini diketahui bahwa semakin baik kompetensi pegawai maka akan semakin baik kinerja pegawai tersebut. Dengan kompetensi yang baik maka akan membantu pegawai tersebut dalam memperjelas kualifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya. Selain itu pegawai harus selalu megacu kepada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan agar modal pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dimiliki oleh pegawai serta pengembangannya dapat memiliki kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan organisasi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan *e-government* pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta terdapat dua indikator dengan persentase masing-masing 79% yakni indikator sumber daya dan indikator struktur birokrasi, maka untuk meningkatkan keberhasilan kedua indikator tersebut diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta dapat menambah sumber daya manusia dengan latar belakang bidang teknologi informasi (TI) dan/atau mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai yang telah ada terkait dengan pemahaman kebijakan *e-government* agar penerapannya dapat lebih maksimal.
2. Untuk dua indikator lainnya terkait penerapan kebijakan *e-government* yakni komunikasi dan disposisi yang memiliki persentase keberhasilan lebih dari 80% diharapkan agar kebijakan-kebijakan terkait indikator tersebut seperti adanya sosialisasi sebelum penerapan kebijakan baru ataupun kejelasan wewenang serta mekanisme penempatan posisi pegawai sehingga nantinya hasil penerapan kebijakan *e-government* dapat konsisten.
3. Diharapkan adanya upaya agar dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta faktor motif pribadi dapat diminimalisir sehingga RKA yang dihasilkan benar-benar merupakan kebutuhan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Dalam upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi penyusun anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi D.K.I. Jakarta yang telah berada pada kategori baik, diharapkan adanya perencanaan peningkatan

pengetahuan, kemampuan, dan sikap pegawai secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kebutuhan kekinian pegawai sehingga para pegawai dapat menguasai bidang pekerjaannya.